



Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

ANALISIS PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM UPAYA MENGURANGI MASALAH PENGANGGURAN TERDIDIK DI WILAYAH KOTA PEKANBARU

SKRIPSI



Oleh:

ZULKIFLI ALWI
NIM. 11575104604

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022



UIN SUSKA RIAU

ANALISIS PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM UPAYA MENGURANGI MASALAH PENGANGGURAN TERDIDIK DI WILAYAH KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Stata Satu pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ZULKIFLI ALWI
NIM. 11575104604

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Zulkifli Alwi
 NIM : 11575104604
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : ANALISIS PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM UPAYA
 MENGURANGI MASALAH PENGAGGURAN TERDIDIK DI
 WILAYAH KOTA PEKANBARU

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Virna Museliza, SE, M.Si
 NIK. 130 712 073

MENGETAHUI:

**DEKAN
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA JURUSAN
 Ilmu Administrasi Negara**

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Zulkifli Alwi
NIM : 11575104604
PROGRAM STUDI : Ilmu Administrasi Negara
FAKULTAS : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
JUDUL : Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Upaya Mengurangi Masalah Pengangguran Terdidik Di Wilayah Kota Pekanbaru
TANGGAL UJIAN : 21 Juli 2022

TIM PENGUJI

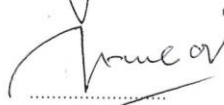
Ketua
Astuti Meflinda, SE, MM



Sekretaris
Hijratul Aswad, SE, M.Ak



Penguji I
Afrinaldi rustam, S.IP., M.Si



Penguji II
Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

*Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zulkifli Alwi

NIM : 11575104604

Tempat/ Tgl. Lahir : Kotabaru, 07 Juni 1996

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : S1 Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Upaya Mengurangi Masalah Pengangguran Terdidik Di Wilayah Kota Pekanbaru**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



ZULKIFLI ALWI
NIM. 11575104604

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



UIN SUSKA RIAU

ANALISIS PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM UPAYA MENGURANGI MASALAH PENGANGGURAN TERDIDIK DI WILAYAH KOTA PEKANBARU

Oleh:

Zulkifli Alwi

NIM. 11575104604

ABSTRAK

Kota Pekanbaru mengalami penambahan pengangguran yang hampir sama dengan kota-kota lain di Indonesia. Ironinya pengangguran yang ada di Pekanbaru sebagian besar adalah mereka yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi, yakni SLTA dan Diploma maupun tingkat Sarjana. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah pengangguran yaitu adanya dampak pandemi Covid 19, revolusi industri, persaingan dengan tenaga kerja asing dan lain sebagainya terhadap ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan juga bagaimana implementasi kebijakan Disnaker dalam upaya mengurangi masalah pengangguran terdidik di wilayah kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dimana akan dijelaskan dan dijabarkan sebuah fenomena secara mendalam lalu menarik kesimpulan sesuai teori George C Edwards III tentang faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan menggunakan sumber data sekunder, wawancara dan observasi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru memiliki peran dalam menjembatani dan memediasi para pencari kerja dengan perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja, namun dikarenakan berbagai faktor eksternal seperti pandemi membuat lonjakan pengangguran besar-besaran membuat Disnaker kualahan dalam mengendalikan angka pengangguran terdidik di Pekanbaru. Namun disisi lain Disnaker justru tidak memiliki strategi khusus dalam mengatasi masalah pengangguran terdidik. Hal ini dikarenakan Disnaker beranggapan bahwa pengangguran dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan yang tidak sama saja, semuanya menjadi tanggung jawab Disnaker maka tidak ada perlakuan ataupun perhatian khusus terhadap golongan tertentu. Untuk mengatasi masalah tersebut, Disnaker Kota Pekanbaru berupaya menekan angka pengangguran dengan membuat dan melaksanakan dua program ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan sasaran para pencari kerja yaitu, yang pertama “Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja”, kedua “Program Peningkatan Kesempatan Kerja”.

Kata kunci: Disnaker Kota Pekanbaru, Implementasi, Kebijakan, Peran, Pengangguran Terdidik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, baik dalam bentuk atau bentuk lain, termasuk sebagian atau seluruh gambar, kutipan dari artikel, surat kabar, buku dan lain-lain yang diterbitkan atau tidak diterbitkan di media massa atau melalui elektronik tanpa izin dari institusi yang bersangkutan.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah puji dan syukur penulis langitkan kepada Allah SWT dan ridanya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM UPAYA MENGATASI MASALAH PENGANGGURAN TERDIDIK DI WILAYAH KOTA PEKANBARU”**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling yang senantiasa memberikan do'a dan dukungannya. Terima kasih Peneliti sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda Jasuli (alm) yang menjadi sosok panutan Penulis dan ibunda tercinta Sanatang (almh), semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah aamiin yaa rabbal 'alamiin. Dan segenap keluarga besar Penulis: Suheri, M.Pd, Misnawati, Sulaiman, Marhan, Nurlaila, Syarifah Fadilah, Anisah Kurniawati, M.Pd;
2. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Uin Suska Riau;
3. DR. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau;

4. Virna Museliza, SE, M.Si selaku Dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan;
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan pengalaman dan ilmunya selama masa kuliah, dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini;
6. Kepada sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka serta mensupport dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini, terimakasih tak-terhingga kepada M. Rezky Ermansyah dan seluruh teman-teman kost Al-Fajar 75B;
7. Dan juga semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT *Amin ya robbal' alamin*.

Dan akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan lain sebagainya. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Dan tentunya peneliti berharap semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 24 Juni 2022

Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Alasan Pemilihan Judul	8
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1. Devenisi Peran	11
2.2. Kebijakan	13
2.3. Implementasi Kebijakan	19
2.4. Ketenagakerjaan	28
2.5. Pengangguran Terdidik	36
2.6. Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu SDM	37
2.7. Kebijakan Menurut Pandangan Islam	39
2.8. Konsep Oprasional	42
2.9. Penelitian Terdahulu	44
2.10. Kerangka Bepikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Desain Penelitian	47
3.2. Lokasi Penelitian	47
3.3. Informan Penelitian	47
3.4. Teknik Pengumpulan Data	48
3.5. Teknik Analisis Data	49
BAB IV GAMBARAN UMUM DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU	51



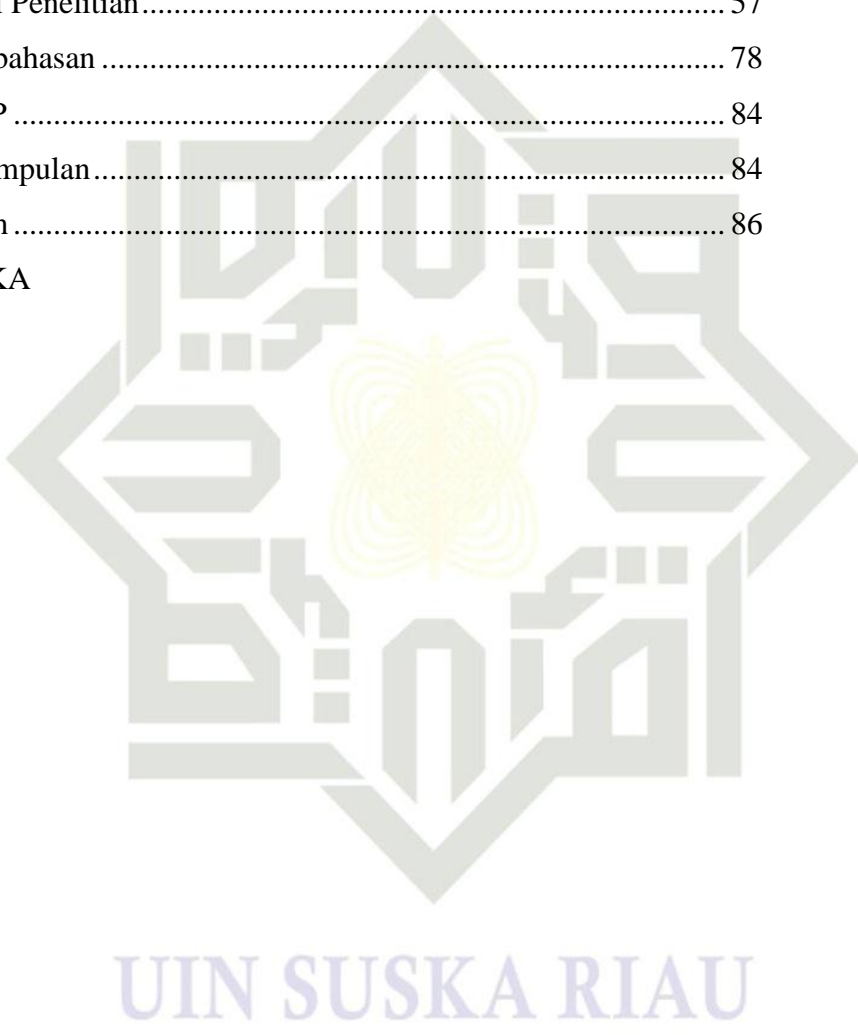
UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

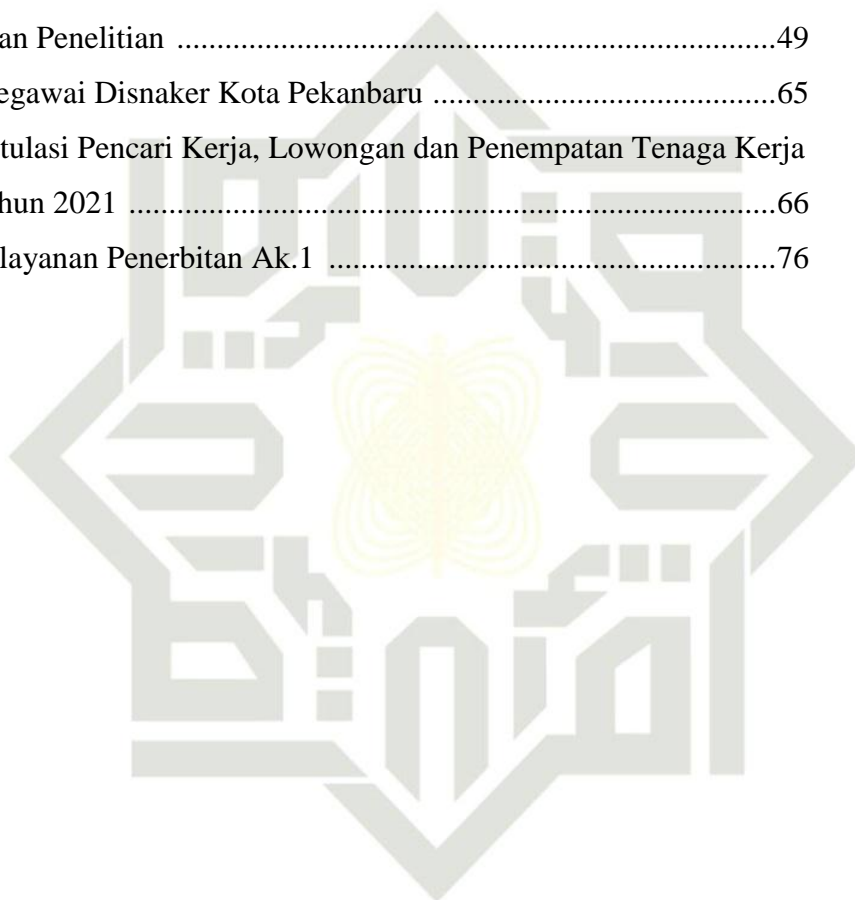
4.1. Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	51
4.2. Landasan Hukum	51
4.3. Visi dan Misi DISNAKER Kota Pekanbaru.....	52
4.4. Tugas Pokok dan Fungsi Disnaker Kota Pekanbaru	54
4.5. Struktur Birokrasi Disnaker Kota Pekabaru	56
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
5.1. Hasil Penelitian.....	57
5.2. Pembahasan	78
BAB VI PENUTUP	84
6.1. Kesimpulan.....	84
6.2. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

<p>© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang memperjualbelikan atau menyewakan hak cipta ini kepada pihak lain. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>ABEL 1.1 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama di Kota Pekanbaru Tahun 2018-20204</p> <p>ABEL 2.1 Konsep Oprasional43</p> <p>ABEL 2.2 Penelitian Terdahulu44</p> <p>ABEL 3.1 Informan Penelitian49</p> <p>ABEL 5.1 Data Pegawai Disnaker Kota Pekanbaru65</p> <p>ABEL 5.2 Rekapitulasi Pencari Kerja, Lowongan dan Penempatan Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Tahun 202166</p> <p>ABEL 5.3 Sop Pelayanan Penerbitan Ak.176</p>



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tantangan besar dalam bidang ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini adalah tingkat pengangguran yang masih besar jumlahnya, lapangan pekerjaan belum mencukupi, dan peningkatan pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan.

Di samping itu bursa tenaga kerja semakin meningkat sejak awal diberlakukannya Pasar Bebas Asean (MEA) pada tahun 2015 lalu. Ini akan mempengaruhi banyak orang, terutama pekerja yang berkecimpung pada sektor pertanian. Dengan kata lain pekerja di Indonesia akan menghadapi persaingan dari pekerja-pekerja lain di Asia Tenggara. Pertanyaannya adalah apakah tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja asing? sedangkan angkatan kerja lokal terus bertambah dan lapangan pekerjaan yang terbatas.

Sementara itu dalam meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia dihadapkan oleh berbagai kendala seperti kesempatan kerja yang masih menjadi masalah utama. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan atau ketimpangan untuk mendapatkannya. Ketimpangan dalam mendapatkan kesempatan kerja akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Pengangguran di negara-negara sedang berkembang pada umumnya di dominasi oleh pengangguran usia muda dan berpendidikan (Todaro dan Smith, 2010).

Di sisi lain dunia saat ini memasuki gelombang Revolusi Industri 4.0. Revolusi 4.0 berbicara tentang implementasi teknologi automasi dan pertukaran



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

data dalam bidang industri yang dipengaruhi perkembangan teknologi serta Internet atau yang disebut digitalisasi. Seperti yang telah disampaikan oleh Clause Wab (*Founder & Eksekutif Chairman Word Economic Forum*) dalam bukunya *The Fourth Industry Revolution*” bahwa revolusi 4.0 sebenarnya ditandai dengan seaneunian super computer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, *editing genetic*, dan perkembangan *newroteknology* yang lebih memungkinkan manusia untuk memaksimalkan fungsi otak. Mereka seolah menjanjikan segala kemudahan yang pasti didapatkan dengan damai.

Sementara terealisasinya revolusi industry 4.0 di prediksi akan menimbulkan problem besar yaitu pengangguran besar-besaran disebabkan oleh mesin-mesin atau robot canggih yang menggantikan pekerjaan manusia. Teknologi mampu menggeserkan perusahaan besar sekalipun hingga tidak jarang mereka gulung tikar.

Kewaspadaan dini dalam mengantisipasi ledakan pengangguran bakal menjadi awal yang baik menuju bonus demografi pada 15-20 tahun kedepan. Tanpa persiapan matang sejak sekarang bonus demografi pada 2035-2040, bukan menjadi berkah bangsa melainkan bencana. Ledakan jumlah penduduk usia produktif tanpa disertai lapangan pekerjaan yang memadai bakal menjadi malapetaka. Pontensi tenaga produktif tidak terwadahi dalam usaha mendorong perekonomian. Sebaliknya mereka yang seharusnya menjadi penopang usia anak dan lansia justru menjadi beban.

Pada masyarakat yang tengah berkembang, pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja yang ada. Dalam arti lain, tujuan akhir program pendidikan bagi masyarakat pengguna jasa pendidikan adalah teraihnya lapangan kerja yang diharapkan. Atau setidaknya setelah lulus dapat bekerja di sektor formal yang memiliki nilai upah yang lebih tinggi di banding sektor informal.

Dengan demikian, keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga berpotensi untuk tidak dapat tertampungnya lulusan program pendidikan tinggi di lapangan kerja, secara linear berpotensi menggugat eksistensi dan urgensi pendidikan dalam perspektif masyarakat. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap eksistensi lembaga pendidikan.

Kesempatan kerja merupakan indikator penting tingkat kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Maka merebaknya isu “pengangguran terdidik” menjadi sinyal yang cukup mengganggu bagi perencanaan pendidikan diberbagai perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terdidik merupakan rasio jumlah pencari kerja yang berpendidikan SLTA keatas (sebagai kelompok terdidik) terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok tersebut. Selain itu menurut Tobing (2007:25), pengangguran tenaga kerja terdidik yaitu angkatan kerja yang berpendidikan menengah keatas (SMA, Diploma, dan Sarjana) yang tidak berkerja.

Di provinsi Riau juga tidak terlepas dari dampak krisis ekonomi, khususnya kota Pekanbaru yang mengalami penambahan pengangguran yang hampir sama dengan kota-kota lain di Indonesia. Ironinya pengangguran yang



UIN SUSKA RIAU

Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Pak cipta mi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebar di kota pekanbaru sebagian besar adalah pengangguran yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi, yakni SLTA dan Diploma maupun tingkat Sarjana

TABEL 1.1

Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2020

Jenis Kegiatan Utama	Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru				
	Laki-laki+Perempuan				
	2020	2019	2018	2017	2015
Angkatan Kerja	555138	558065	539831	513271	476420
Angkatan Kerja - Bekerja	507617	514200	494362	467555	440873
Angkatan Kerja - Pengangguran	47521	43865	45469	45716	35547
Bukan Angkatan Kerja	296031	285977	281817	286024	279339
Bukan Angkatan Kerja - Sekolah	85083	95684	86668	110635	104240
Bukan Angkatan Kerja - Mengurus Rumah Tangga	179621	160646	164962	110635	148607
Bukan Angkatan Kerja - lainnya	31327	29647	30187	156415	26492

Sumber: BPS Kota Pekanbaru (Diolah dari data Sakernas)
Data dikutip dari Publikasi Kota Pekanbaru Dalam Angka

Penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sementara angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur, sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya.

Dari segi angkatan kerja pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018, 2017 dan 2015 sedangkan pada tahun 2020 hanya mengalami sedikit penurunan namun tidak begitu mencolok yakni sekitar 2.927 orang atau sekitar 2.9% saja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2020



sebanyak 555.138 orang, tahun 2019 sebanyak 558.065 pada tahun 2018 sebanyak 539.831 orang tahun 2017 sebanyak 513.271 orang, pada tahun 2016 dan tidak terlampir di BPS, serta pada tahun 2015 sebanyak 476.420 orang. Peningkatan jumlah angkatan kerja pengangguran dipicu oleh kenaikan penduduk angkatan kerja yang setiap tahunnya relatif mengalami kenaikan. Sedangkan di sisi lain, jumlah penduduk yang menganggur mengalami fluktuasi. Jumlah penduduk yang menganggur mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019, yaitu dari 45.716 orang pada tahun 2017 menjadi 45.469 atau selisih 247 orang saja pada tahun 2018 dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2019 menjadi 3.865 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang menganggur pada tahun 2020 adalah sebesar 47.521 dan mengalami peningkatan cukup signifikan jika dibandingkan empat tahun sebelumnya. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah pengangguran yaitu adanya dampak pandemi Covid 19, revolusi industri, persaingan dengan tenaga kerja asing dan lain sebagainya terhadap tenaga kerja di Kota Pekanbaru. Ini menunjukkan bahwa ditengah tingginya populasi angkatan kerja terdidik belum terserap dengan baik di lapangan pekerjaan.

Dari uraian diatas menunjukkan beberapa isu atau masalah sentral yang berkaitan dengan masalah pengangguran terdidik diantaranya:

- 1) Isu mengenai Revolusi Industri 4.0,
- 2) Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)
- 3) Bonus Demografi
- 4) Pandemi Covid-19



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Maknupta mik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang mana semuanya akan dihadapi bangsa ini sekaligus. Namun dalam penelitian kali ini penulis tidak akan membahas isu tersebut melainkan menjadikan isu tersebut sebagai acuan bahwa pentingnya sebuah rangkaian kebijakan yang tepat dalam mengatasi fenomena tersebut oleh pemerintah dalam hal ini Dinas tenaga kerja kota pekanbaru.

Dinas tenaga kerja mempunyai tugas pokok membantu walikota untuk melaksanakan tugas dibidang ketenagakerjaan. Selanjutnya dinas tenaga kerja berfungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan.
- b. Pemberi izin dan pelaksana pelayanan umum dibidang ketenagakerjaan.
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Tenaga Kerja.

Adanya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maka pemerintah berkewajiban dalam mengatasi masalah pengangguran. Dapat dilihat dalam pasal 1 menyatakan: (1) perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang di jadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. (2) Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. (3) Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan



© Hak cipta mik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk mengatasi masalah pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru berupaya menekan jumlah pengangguran dengan membuat dan melaksanakan program ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan sasaran para pencari kerja. Dalam program ketenagakerjaan ini, Dinas Tenaga Kerja melaksanakan kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan program ini. dua program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - a. Pelatihan Kerja
 - b. Pemagangan
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - A. Penempatan Tenaga Kerja pada Sektor Formal
 - a. Job Canvassing
 - b. Pameran Bursa Kerja atau Job Expo
 - c. Bursa Kerja Online
 - B. Penempatan Tenaga Kerja pada Sektor Informal

Pendayagunaan tenaga kerja pada sektor informal dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

 - a) Kegiatan Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat :
 - 1) Pelatihan Terapan Teknologi Tepat Guna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Home Industry
- 3) Pemberdayaan Padat Karya: a) Infrastruktur, b) Produktif
- b) Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Upaya Mengurangi Masalah Pengangguran Terdidik di Wilayah Kota Pekanbaru**”.

2. Alasan Pemilihan Judul

Penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Dalam Upaya Mengurangi Masalah Pengangguran Terdidik di Wilayah Kota Pekanbaru” ini, penulis angkat dengan berbagai pertimbangan antara lain:

- 1) Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian ini menarik untuk diteliti karena maraknya pengangguran terdidik di kota Pekanbaru yang mana penelitian yang berfokus dalam kasus ini sangat jarang di angkat kepermukaan, sehingga menurut penulis penelitian ini sangat penting dan *urgen* untuk diteliti.
- 2) Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena penulis merasa terpanggil untuk memberikan sumbangsih pemikiran dengan melakukan penelitian, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya srategi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi kota pekanbaru dalam upaya mengatasi masalah pengangguran terdidik di Pekanbaru.

3. Penulis mempunyai kemampuan untuk mengadakan penelitian baik dari segi waktu, jarak tempuh, materi dan lain sebagainya.

Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Untuk menghindari bahasan masalah menjadi terlalu luas, maka penulis membatasi penelitian pada Analisis Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Dalam Upaya Mengurangi Masalah Pengangguran Terdidik di Wilayah Kota Pekanbaru saja.

1.3.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja dan Implementasi Kebijakannya Dalam Upaya Mengurangi Masalah Pengangguran Terdidik Di Wilayah Kota Pekanbaru?

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran dan Implementasi Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam upaya mengurangi masalah pengangguran terdidik di kota Pekanbaru.

4.2. Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Akademis

- 1) Sebagai aplikasi dari teori-teori yang penulis peroleh diperguruan tinggi dan membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Serta melatih kemampuan penulis dalam menganalisis suatu masalah dan berpikir kritis sistematis;
- 2) Sebagai bentuk sumbangsih pemikiran penulis, dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa terkhusus mahasiswa Uin Suska Riau dan masyarakat di bidang penelitian strategi dan kebijakan.

B. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana program study Ilmu Administrasi Negara Uin Suska Riau;
- 2) Diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi Disnaker dalam mengambil langkah kebijakan serta berguna dalam menentukan strategi dalam upaya mengatasi masalah pengangguran terdidik terkhususnya di kota Pekanbaru;

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Kerangka teori merupakan landasan berguna sebagai pendukung pemecahan masalah. Oleh karena itu perlu disusun sebuah kerangka yang memuat pokok-pokok pikiran dari suatu permasalahan dan juga mencakup sudut pandang dalam menyoroti masalah penelitian (Nawawi, 1993:60).

Kerangka teoritis memuat teori-teori yang akan mempermudah menjawab permasalahan dalam teori. Dari kerangka teoritis inilah konsep operasional dirumuskan dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian lapangan.

1.1. Devenisi Peran

Dalam teorinya, Biddle dan Thomas, yang dikutip oleh Sarwono dalam Teori-Teori Psikologi Sosial (2004:21) mengatakan bahwa: “Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.”

Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi sehingga strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception*.

Oleh karena itu, jika seseorang atau sekelompok orang atau organisasi memiliki hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka organisasi



tersebut memenuhi peran yang diberikan kepadanya. Peran dan kedudukan(status) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, artinya tidak ada kedudukan tanpa peranan, dan tidak ada peranan tanpa kedudukan. Kedudukan(status) itu sendiri dapat diartikan sebagai kedudukan atau peran seseorang dalam suatu kelompok sosial, di mana ia berpartisipasi dalam berbagai kehidupan sosial, dan ia dipisahkan dari individu yang memilikinya, maka kedudukan hanyalah kumpulan hak-hak dan kewajiban.

Horton dan Hunt(1996:118) mengungkapkan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Lebih lanjut lagi dikatakan:

Peran (*role*) merupakan perilaku yang diharapkan dari individu atau kelompok yang mempunyai suatu status. Seseorang atau kelompok masyarakat memiliki status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, peran dan status adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan hak-hak tersebut.

Kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) merupakan unsur-unsur dalam lapisan masyarakat yang memiliki arti penting dalam sistem sosial. Soekanto dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar (2004:243), yakni:

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.

Seseorang memiliki kedudukan (*status*) dan melaksanakan peranannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah diberikan atas kedudukan atau



statusnya didalam suatu organisasi sehingga dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas, dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Menurut Levinson yang dikutip Soekanto dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar (2004:244), peranan mungkin mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Kebijakan

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat.

Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memengang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penerbitan dengan cara apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut.

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Berikut adalah definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik.

Thomas R. Dye (1981)

Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian.

Easton (1969)

Mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Dye (1978)



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*Whatever governments choose to do or not to do.*” yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda.

Dia juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Chief J.O. Udoji (1981)

Mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai “*An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large.*” Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures* (Hakim, 2002).

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi

1. Pembuatan kebijakan
2. Pelaksanaan dan pengendalian
3. Evaluasi kebijakan

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu :

- 1) penyusunan agenda,
- 2) formulasi kebijakan,
- 3) adopsi kebijakan,
- 4) implementasi kebijakan, dan
- 5) penilaian kebijakan.

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut:

Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat.

1. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
2. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Penyusunan Model. Yakni merupakan penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain.
4. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
5. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya

Menurut Brojonegoro dalam Tritjahjo (2005: 57) “Kebijakan program untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan meliputi empat aspek yaitu: kurikulum, tenaga kependidikan, sarana pendidikan dan kepemimpinan satuan pendidikan”. Pengembangan kurikulum berkelanjutan di semua jenjang pendidikan meliputi:

- a) pengembangan kurikulum pendidikan dasar yang dapat memberikan kemampuan dasar secara merata yang disertai dengan penguatan muatan lokal;
- b) Mengintegrasikan keterampilan generik dalam kurikulum yang memberikan kemampuan adaptif yang meliputi empat kelompok keterampilan, yaitu: pengelolaan diri, komunikasi, mengelola orang tugas serta melakukan inovasi dan perubahan;
- c) Mengembangkan program studi, jurusan dan fakultas di perguruan tinggi yang didasarkan atas studi kelayakan;
- d) Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi, dan pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
- e) Mengembangkan keteladanan dalam pendidikan (Tritjahjo, 2005: 57).



2.3. Implementasi Kebijakan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.3.1. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknis bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan dan program-program.

Ripley dan Franklin (dalam Budi Winarno, 2012:148) mengungkapkan bahwa implementasi memiliki arti apa yang telah terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintahan. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksud untuk membuat program berjalan.

Grindle berpendapat (dalam Budi Winarno, 2012:149) yang memberikan pengertian berbeda terkait dengan implementasi, yaitu :

Tugas implementasi membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu tugas implementasi adalah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai terbentuknya “*a policy delivery system*”, dimana sarana–sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan–tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

2.3.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

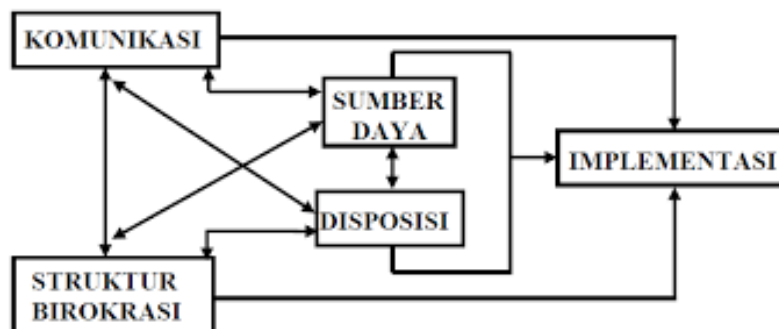
Keberhasilan implementasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, para ahli juga memeparkan pendapatnya, antara lain:

1. Model George C Edwards III

Model implementasi kebijakan ini berperspektif *top down*. Subarsono (2011: 90) berpendapat bahwa faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berdiri sendiri namun juga saling berkaitan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini peneliti dapat menjelaskan variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1.


Sumber: Edward III (dalam Subarsono, 2011:91)

Faktor penentu implementasi menurut Edward III
A. Komunikasi

Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diinformasikan mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektronik, sosial dll.

Komunikasi akan terwujud baik jika ada faktor-faktor yang menjadikan komunikasi tersebut berjalan baik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur Komunikasi, Sumber Daya, Implementasi, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. tiga keberhasilan variable komunikasi tersebut antara lain (dalam Agustino, 2006:150-151):

- 1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan komunikasi yang baik pula.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan mudah dimengerti agar mudah melakukan tindakan.
- 3) Konsistensi, perintah yang diberikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan haruslah tetap pada pendirian awal dan jelas.

B. Sumberdaya

Selain informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementator. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja.

C. Disposisi

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Faktor-faktor mengenai disposisi implementasi kebijakan oleh George C. Edward III (dalam Agustino, 2006: 152-153) antara lain:

1) Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap para pelaksana akan mengakibatkan permasalahan yang akan timbul pada implementasi kebijakan jika personilnya tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan

atau pengangkatan personil untuk melaksanakan kebijakan adalah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, khususnya pada kepentingan masyarakat.

2) Insentif

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah para pelaksana cenderung melakukan manipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingannya sendiri. Manipulasi intensif yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan organisasi

D. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Ada dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja birokrasi menurut George C Edward III (dalam Agustino, 2006:153-154) yaitu:

1) *Standard Operational Procedures* (SOP)

SOP adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh para pegawai (pelaksana



kebijakan/administrator/birokrat) berdasarkan dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan masyarakat) dalam pekerjaannya.

2) Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktivitas kerja kepada beberapa pegawai dalam unit- unit kerja, untuk mempermudah pekerjaan dan memperbaiki pelayanan.

2. Sementara itu keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi variabel besar, yakni :

- a) Isi kebijakan (*content of policy*), yang mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan, (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, (4) apakah letak sebuah program sudah tepat, (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya secara rinci, (6) apakah program didukung oleh sumber daya yang memadai.
- b) Lingkungan implementasi (*context of implementation*), mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan,kepentingan,dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan, (2) karakteristik institusi dalam



rejim yang sedang berkuasa, (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini penelitian dapat menjelaskan variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

Isi kebijakan (*content of policy*), yang mencakup:

- a) Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Dalam pengertian ini, kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan oleh masyarakat atau kelompok untuk memecahkan masalah yang terjadi di kehidupannya. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat atau kelompok banyak sekali masalah yang membelenggu dan butuh kebijakan yang dibuat pemerintah. Disini kebijakan yang sangat dibutuhkan harus terlaksana agar mengeluarkan masyarakat dari masalah tersebut.
- b) Jenis manfaat yang diterima oleh target group. Suatu kebijakan adalah upaya untuk memperbaiki keadaan, jika keadaan yang diterima masyarakat atau kelompok tidak jauh berbeda dari sebelumnya, maka manfaat dari kebijakan tersebut tidak ada.
- c) Perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Kebijakan publik yang berhasil bukan dinilai dari isinya yang prestisius namun implementasinya di lapangan. Apakah mampu membawa perubahan yang baik atau malah sebaliknya.



- d) Ketepatan sebuah program. Sebuah program kebijakan harus tepat agar nanti dalam implementasinya berhasil sesuai dengan harapan. Tepat disini meliputi, tepat sasaran, tepat kebutuhan, tepat lingkungan dan tepat guna.
- e) Rincian implementor kebijakan. Kebijakan yang sudah dibuat tidak bisa dinilai keberhasilannya tanpa ada implementor atau pelaksananya. Karena peran implementor sangat penting, tanpa mereka implementasi kebijakan tidak berjalan. Implementor tak cuma satu tapi ada beberapa, maka harus lengkap karena masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda yang saling melengkapi.
- f) Dukungan dari sumber daya yang memadai. Sumber daya manusia (implementor) harus memadai dan tahu peran dan fungsinya secara baik agar tidak keliru. Selain itu sumber daya modal harus sesuai kemampuan agar tidak terjadi kekurangan uang untuk menunjang implementasi kebijakan.

2) Lingkungan implementasi (*content of implementation*), yang mencakup:

- a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat didalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini para aktor kebijakan yang jumlahnya lebih dari satu pasti memiliki pemikiran yang beraneka ragam. Sehingga masing-masing memiliki kepentingan dan strategi yang berbeda.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Karena mereka terikat pada jabatan yang mereka punya. Sehingga berdampak pada kebijakan yang dibuat. Besar kecilnya tersebut ditentukan oleh jabatan yang mereka duduki.
- b) Karakteristik institusi dalam rezim yang sedang berkuasa. Dalam politik negara nama rejim itu tergantung pada penguasa negara yang sedang menjabat. Maka perilaku dan sifat pemimpin negara dapat dilihat pada kebijakan yang dibuat. Dalam suatu rezim, institusi selaku kaki tangan kepala negara maka akan sangat nurut dengan kepala negara dan sistem yang ditentukan kepala negara.
 - c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Dalam implementasi kebijakan publik, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena perilaku masyarakat (kelompok sasaran) sangat menentukan.

Dari teori George C. Edwards III dan Merilee S. Grindle mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, peneliti akan menggunakan teori milik George C. Edward III untuk landasan teori penelitian ini. Selain lebih cocok menggunakan model George C. Edwards III, teori ini memiliki kelebihan yaitu lebih mudah dan jelas untuk digunakan untuk pembahasan penelitian ini.





2.4. Ketenagakerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sumber daya manusia mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja yang diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang atau jasa. Pengertian kedua dari sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu melaksanakan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Payaman Simanjutak, 1985).

Sumber daya manusia atau sering disebut dengan *human resources* merupakan penduduk secara keseluruhan. Dari segi penduduk sebagai faktor produksi, maka tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi. Hanya penduduk yang berupa tenaga kerja (*man power*) yang dapat dianggap sebagai faktor produksi (Suparmoko, 1997).

Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah bekerja atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga (Payaman Simanjutak, 1985). Sedangkan menurut Secha Alatas (dalam Fitra Kinca Rizka, 2007) tenaga kerja merupakan bagian dari penduduk yang mampu bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menggolongkan penduduk usia 15-64 tahun sebagai tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia digunakan penetapan umur maksimal,



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Malarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk yang sudah bekerja atau mencari pekerjaan.

Menurut Payaman Simanjutak (1985), konsep dari tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*labor force*) merupakan bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja ini terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang bekerja (*employed persons*) merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya yang tergolong siap bekerja dan sedang mencari pekerjaan termasuk di dalam golongan menganggur.

Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan, atau bisa dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi. Kelompok bukan angkatan kerja ini terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain yang menerima pendapatan.

Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) memberikan pengetahuan dan definisi terhadap konsep ketenaga kerjaan sebagai berikut:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Umur

Umur seseorang dapat diketahui bila tanggal, bulan dan tahun kelahiran diketahui. Penghitungan umur menggunakan pembulatan ke bawah atau umur menurut ulang tahun terakhir. Umur dinyatakan dalam kalender masehi.

3) Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab, seperti menunggu panen, pegawai yang sedang cuti dan sejenisnya. Selain itu, juga termasuk angkatan kerja adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari/ mengharap pekerjaan dan orang

yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja atau dengan kata lain pengangguran.

Bekerja

Kegiatan bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi dengan menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

6) Sementara tidak bekerja

Sementara tidak bekerja adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam, seperti:

- a) Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, perusahaan menghentikan kegiatannya sementara (misalnya kerusakan mesin) dan sebagainya.
- b) Petani-petani yang mengusahakan gabah pertanian sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya.
- c) Orang-orang yang bekerja di bidang keahlian seperti dokter, tukang cukur, tukang pijat dan sebagainya sedang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak bekerja karena sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya.

Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka meliputi:

- a) Penduduk yang sedang mencari pekerjaan
- b) Penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha
- c) Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
- d) Penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

8) Mencari Pekerjaan

Mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode waktu.

9) Mempersiapkan Usaha

Memperisapkan usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tidak dibayar.

10) Setengah Penganggur

Setengah penganggur adalah penduduk usia kerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau kurang dari jam kerja normal.

11) Setengah Penganggur terpaksa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setengah penganggur terpaksa adalah penduduk usia kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu dan masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara mencari pekerjaan dan atau mempersiapkan usaha.

2) Setengah Penganggur sukarela

Setengah penganggur sukarela adalah penduduk usia kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu dan tidak mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran, terhadap 100 penduduk yang masuk kategori angkatan kerja.

14) Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk yang selama seminggu yang lalu memunyai kegiatan yang tidak termasuk dalam angkatan kerja seperti:

- a) Sekolah, yaitu mereka yang kegiatannya di rumah.
- b) Mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah.
- c) Lainnya, yaitu mereka yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan seperti yang termasuk dalam kategori

sebelumnya, seperti sudah lanjut usia, cacat jasmani, cacat mental atau lainnya

5) Pekerjaan Purna Waktu (*Full Time*)

Pekerjaan Purna Waktu adalah pekerjaan yang hanya dilakukan sesuai dengan jam kerja yang berlaku di tempat bekerja dan biasanya merupakan pekerjaan utama.

6) Pekerjaan Paruh waktu (*Part Time*)

Pekerjaan Paruh Waktu adalah pekerjaan yang hanya dilakukan pada sebagian waktu dari jam kerja norma yang berlaku di tempat kerja.

17) Lapangan Usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan atau instansi tempat seorang bekerja atau pernah bekerja, meliputi:

- a) Pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan
- b) Pertambangan dan penggalian
- c) Industri pengolahan
- d) Listrik, gas dan air
- e) Konstruksi
- f) Perdagangan, rumah makan dan hotel
- g) Angkutan, pergudangan dan komunikasi
- h) Keuangan, asuransi dan usaha persewaan bangunan
- i) Jas-jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan lainnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

18) Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh seseorang yang bekerja, yang dibagi dalam 8 golongan besar yaitu:

- 1) Tenaga profesional
- 2) Kepemimpinan dan ketatalaksanaan
- 3) Pejabat pelaksana,
- 4) Tenaga tata usaha
- 5) Tenaga usaha penjualan
- 6) Tenaga usaha jasa
- 7) Tenaga usaha pertanian
- 8) Tenaga produksi dan lainnya (operator alat angkutan, tenaga kasar dll).

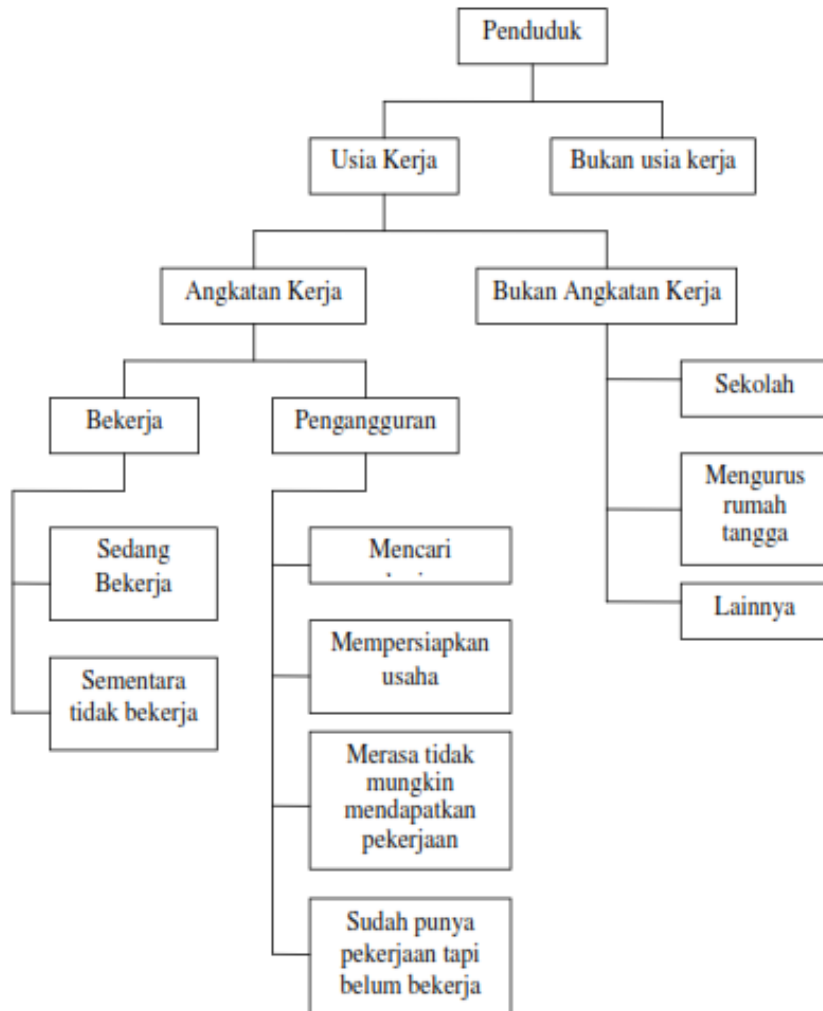
19) Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah status kegiatan usaha seseorang yang sedang bekerja, meliputi:

- a) Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain
- b) Berusaha dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap
- c) Berusaha dibantu buruh tetap
- d) Buruh/karyawan/pekerja dibayar

Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standar Labour Force Concept*) dapat dilihat dalam gambar 1.1 diagram ketenagakerjaan sebagai berikut.

Gambar 2.2.
Diagram Ketenagakerjaan



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

2.5. Pengangguran Terdidik

Menurut Tobing (2007:25), pengangguran tenaga kerja terdidik yaitu angkatan kerja yang berpendidikan menengah keatas (SMA, Diploma, dan Sarjana) yang tidak berkerja. Selain itu Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terdidik merupakan rasio jumlah pencari kerja yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpendidikan SLTA keatas (sebagai kelompok terdidik) terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok tersebut.

6. Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu SDM

Kecenderungan masih adanya presentase angkatan kerja yang berpendidikan tinggi (tersebut) mencerminkan belum efektif lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga berdampak pada masih rendahnya kualitas angkatan kerja Indonesia di dunia kerja (Lembaga Demografi FEB-UI, 2016).

Padahal lapangan pekerjaan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dari penyelenggaraan pendidikan. Jenjang pendidikan dianggap sebagai sarana dalam mendapatkan lulusan-lulusan seorang (SDM) yang berkualitas. pendidikan dipandang mampu meluluskan para peserta didiknya untuk menjadi tenaga kerja yang bermutu tinggi, memiliki pola pikir yang luas dan bertindak dengan cara yang baik. Dikatakan demikian sebab di suatu proses pendidikan terdapat pembelajaran maupun pelatihan yang menunjang. Sumber daya manusia atau tenaga kerja yang seperti inilah yang diharapkan bangsa ini mampu untuk memperbaiki dan mengembangkan pembangunan (Suryadi, 1995).

Lulusan Universitas perguruan tinggi yang diharapkan dapat membenahi negeri ini dari berbagai masalah yang dihadapi, tetapi malah ikut serta terjebak pada deretan angka pengangguran terdidik, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka lebih besar keinginan seseorang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan yang ditempuhnya. Hal tersebut menjadikan angkatan kerja terdidik lulusan Universitas lebih memilih untuk menganggur. Dengan alasan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkannya (tobing, 1994).

Hal ini menjadi masalah bagi pemerintah karena semakin banyak jumlah pengangguran terdidik lulusan universitas maka mencerminkan bahwa pemerintah telah gagal dalam dua hal, yaitu gagal dalam memperluas kesempatan kerja serta gagal dalam menerapkan system pendidikan yang tidak hanya mengandalkan kemampuan akademik saja tetapi mengembangkan ataupun melatih kemampuan untuk dapat bersaing di dunia kerja.

Sesuai dengan amanat pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Dengan adanya Undang-undang, tentu saja diharapkan bahwa dunia pendidikan tinggi dapat menghadapi perkembangan globalisasi yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan dan peran strategis dalam menajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Selain itu, dengan adanya UU Pendidikan Tinggi, diharapkan sejumlah persoalan yang menjadi kendala dalam mewujudkan pendidikan tinggi dapat terjawab.



UIN SUSKA RIAU

2.7. Kebijakan Menurut Pandangan Islam

Kebijakan adalah seperangkat pedoman untuk bertindak. (Solichin Abdul Wahab, 2006) Al-Quran pada hakikatnya adalah juga sebuah kebijakan, yakni kebijakan Allah yang diturunkan melalui Rasulullah Muhammad, karena al-Quran berisi pedoman (al-Huda) yang memberi petunjuk, tuntunan, panduan, dan arahan bagi seluruh kaum mukmin untuk menuju ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditunjuk Allah untuk menuju surga.

Al-Quran juga disebut sebagai An-Nuur, karena berfungsi memberikan cahaya yang menerangi di dalam kegelapan “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Quran)”.

Ada 6 prinsip utama dalam memperbaiki kinerja kebijakan publik :

- 1) ketuhanan (Ilahiah)
- 2) kemanusiaan (Insaniah)
- 3) keseimbangan (Tawazun)
- 4) keadilan (Al-'adalah)
- 5) pelayanan (Al-khadimah)
- 6) keteladanan (Uswah Al Hasanah)

Ketuhanan (Ilahiah) Setiap aktivitas yang dilakukan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik harus berorientasi pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mengizinkan dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Quran)”.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Sak Iptamika UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

ketuhanan “Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai bertanggungjawab atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suaminya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai bertanggungjawab atas kepemimpinan kalian” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kemanusiaan (Insaniah) Kebijakan apa pun yang dilakukan pada dasarnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia, baik saat ini maupun masa yang akan datang “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” (QS. Al-Baqarah/2:30)

Keseimbangan (Tawazun) Dengan dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, kebijakan apa yang dibuat harus memperhatikan semua dimensi secara seimbang dan proporsional “Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan.” (QS. Ar-Rahman/55:7)

Keadilan (Al-'Adalah) Berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, dan keseimbangan diatas, maka kebijakan apa pun yang dibuat harus berorientasi pada keadilan (tepat sasaran) “Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas



orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya” (HR. Bukhari no. 6788 dan Muslim no. 1688)

Pelayanan (Al-Khadimah) Sesuai dengan keberadaan perumus kebijakan (pemimpin) sebagai abdi, khadam, atau pelayan masyarakat, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keseimbangan, dan keadilan, maka semua kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ada 3 kaidah fikih yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik:

- 1) ad-dhararu yuzalu (kemudaran harus dihilangkan);
- 2) jalbul mashalih wa daf’ul mafasid (meraih kemaslahatan dan menolak kemudaran);
- 3) al-mashlahul ‘ammah muqaddamah ‘alal mashlahatil khasshah (kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu). (Dzazuli, 2010:9-11)

Keteladanan (Uswah Al-hasanah) Selain sebagai abdi, khadam, atau pelayan masyarakat, perumus kebijakan juga adalah seorang pemimpin. Hakikat kepemimpinan digambarkan Rasulullah dalam kalimat “Sayyid al-qawm khâdimihum” (pemimpin suatu kaum/masyarakat adalah hamba/ pelayan bagi mereka).



2.8 . Konsep Oprasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang pengutipan sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa mencantumkan sumber
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Sugiyono (2015), Pengertian definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pengertian operasional menurut Singarimbun adalah sebagai suatu unsur penelitian yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur dalam rangka memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan, sehingga memerlukan operasionalisasi dari masing-masing konsep yang digunakan dalam menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata-kata yang dapat diuji dan diketahui kebenarannya.

Salah satu kunci keberhasilan penelitian, selain perencanaan yang matang, adalah penggunaan definisi operasional dalam mengukur konsep dan variabel penelitian yang kita pelajari atau istilah yang kita gunakan dalam dokumen penelitian kita.

Menentukan variabel secara operasional menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian karena bertujuan untuk memberikan kredibilitas pada metodologi dan untuk memastikan reprodutifitas hasil studi. Studi lain mungkin mengidentifikasi variabel yang sama secara berbeda, sehingga sulit untuk membandingkan hasil dari kedua studi tersebut.

Secara terperinci definisi operasional memiliki empat tujuan, yaitu:

- a) Menetapkan aturan dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Memberikan arti yang tidak ambigu dan konsisten untuk istilah/variabel yang jika tidak dilengkapi dengan definisi operasional, maka dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda.
- c) Membuat pengumpulan data serta analisis lebih fokus dan efisien.
- d) Memandu jenis data dan informasi apa yang dicari oleh peneliti.

TABEL 2.1
Konsep Oprasional

REFERENSI	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Analisis Peran Dinas Pelayanan Kerja Dalam Upaya Mengurangi Masalah Pengangguran Berdidik di Wilayah Kota Pekanbaru	Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	Sumber Daya	1. Sumber Daya Manusia (Kopetensi Implementor) 2. Sumber Daya Finansial
	Disposisi	1. Pengangkatan Birokrat 2. Insentif
	Struktur Birokrasi	1. <i>Standard Operational Procedures</i> (SOP) 2. Fragmentasi (Penyebaran Tanggungjawab)

Sumber: Edward III, 2009



UIN SUSKA RIAU

2.9. Penelitian Terdahulu

TABEL 2.2
Penelitian Terdahulu

	Judul	Nama	Hasil	Perbedaan
1.	"Analisis Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah Minimum Kabupaten dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik di Kabupaten Semarang" [skripsi]	Yos Merizal	1. variabel UMK memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terdidik, 2. variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terdidik, 3. variabel kesempatan kerja memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terdidik.	Perbedaan penelitian yang dilakukan Yos Merizal dengan penelitian ini adalah alat analisis yg digunakan, yakni menggunakan metode regresi linear berganda. Sedangkan penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.
2.	"Strategi Pemerintah dalam Memperkecil Angka Pengangguran di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru" [jurnal]	Romika dan Ernawati	Pemda akan melakukan upaya strategis dalam menanggulangi pengangguran, antara lain: 1. pengembangan informasi pasar kerja 2. reformasi pelatihan kerja 3. pengembangan dan bimbingan usaha secara mandiri 4. pengembangan usaha informal keluarga 5. penempatan tenaga kerja secara langsung di pasar kerja 6. penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri 7. pengembangan usaha agrobisnis di pedesaan.	Salah-satu yang membedakan jurnal Romika dan Ernawati dengan penelitian ini ialah dari segi isu permasalahan yang tengah dihadapi pada saat itu. Penelitian ini memiliki masalah yang lebih kompleks dari yang sebelumnya, yakni isu mengenai Revolusi industri 4.0, MEA dan bonus demografi yang menjadi tantangan berat dunia kerja saat ini.
3.	Analisis Tingkat Pengangguran dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, di Indonesia [skripsi]	Fitra Kincana Fitra	1. tingkat pengangguran dipengaruhi oleh faktor-faktor pada variabel independennya 2. variabel upah berpengaruh positif dan signifikan 3. variabel beban tanggungan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan 4. variabel inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan 5. variabel pertumbuhan GDP berpengaruh positif dan tidak signifikan	Penelitian ini berbeda dari segi ruang lingkup cakupan yang mana penelitian ini hanya berskala regional tingkat wilayah kota. Sedangkan penelitian Fitra Kincana Fitra mencakup seluruh Indonesia atau nasional.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang melukis sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.10. Kerangka Bepikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mengantumkan data sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh peneliti. Skema sederhana yang dibuat, kemudian dijelaskan secukupnya mengenai mekanisme kerja faktor-faktor yang muncul. Dengan demikian gambaran jelasnya penelitian secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah.

Di dalam kerangka berpikir, variabel-variabel penelitian dijelaskan dengan lebih mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, kerangka pemikiran tersebut dapat dijadikan dasar untuk menjawab masalah.

Kerangka berpikir dapat disajikan dengan bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan keterkaitan antarvariabel yang diteliti. Bagan itu juga disebut dengan paradigma atau model penelitian.

UIN SUSKA RIAU

GAMBAR 2.3

Bagan Kerangka Berpikir



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya atau cara apa pun untuk disebarluaskan dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau cara apa pun untuk disebarluaskan dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana akan dijelaskan dan dijabarkan sebuah fenomena secara mendalam lalu menarik kesimpulan sesuai teori-teori yang relevan (Bungin 2008:68).

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru. Jalan Samarinda No. 29 Telp. 21264 Tangkerang Pekanbaru 28282.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain, yang memahami objek penelitian (Bungin, 2010:76). Dalam penelitian ini Key informannya adalah Pimpinan ataupun Pegawai Dinas Tenaga kerja, yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai *desition maker* atau pengambil keputusan, dan pegawai yang memiliki hak akses akan data ketenagakerjaan, serta informan pendukung lainnya yakni Alumni Mahasiswa angkatan 2015-2020. Dan peneliti akan membandingkan juga dengan dokumen- dokumen yang berkaitan.



TABEL 3.1

Informan Penelitian

	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1.	Abdul Rahim, SP, MMA	Kabid Pembinaan Penempatan & Perluasan Kesempatan Kerja	1 Orang
2.	Budi Hartono, SE	Sub Koordinator Penempatan Dalam Negri & Tenaga Kerja Asing	1 Orang
3.	Firmansyah, S.Sos, M.Si	Sub Bagian Umum	1 Orang
4.	Pencari kerja (Diterima Di Tempat Kerja)	Alumni Perguruan Tinggi	3 Orang
5.	Pencari Kerja(Tidak Diterima di Tempat Kerja)	Alumni Perguruan Tinggi	3 Orang
	Total		9 Orang

- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data digunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada kepala Dinas Tenaga kerja, Kepala Bidang beserta pegawai Dinas Tenaga Kerja yang dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur yaitu merupakan wawancara yang berbeda dengan struktur yang digunakan untuk menentukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal (Moleong,1998:139)



UIN SUSKA RIAU

2) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung kelapangan yakni Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru untuk memperoleh data objektif yang berkaitan dengan penelitian.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu memperoleh data dengan cara mencatat dan mengumpulkan data dari Dinas Tenaga kerja dalam melengkapi data-data penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan strategi analisis deskriptif. Dimana peneliti akan menggambarkan proses berlangsungnya fenomena sosial, dan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses dari fenomena sosial tersebut (Bungin, 2010:153).

Ada tiga sumber literatur yang penulis gunakan dalam proses penelusuran referensi penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1) Sumber Primer

Yaitu sumber langsung, sumber yang belum di interpretasi oleh orang lain, sumber yang berasal dari informan subjek dalam penelitian ini



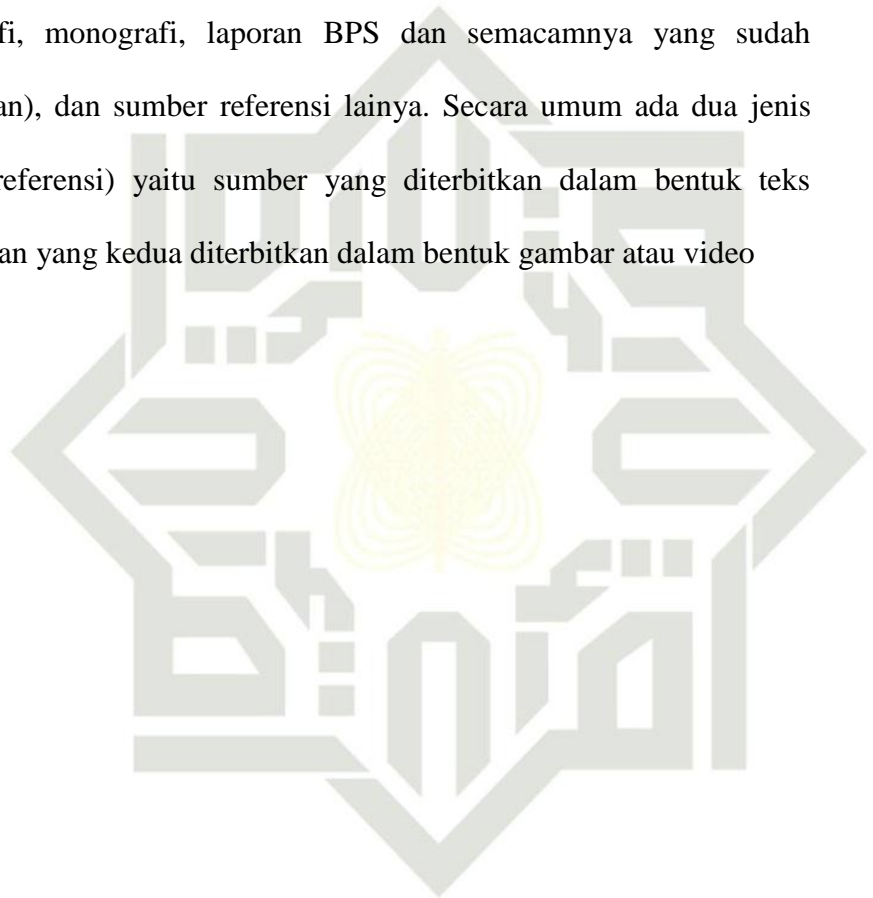
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sumber Skunder

Yaitu buku, artikel, dan tulisan-tulisan lain oleh para Sarjana dan peneliti yang melaporkan hasil penelitian mereka.

3) Sumber Tersier

Yaitu ensiklopedia, index, buku teks (termasuk juga demografi, monografi, laporan BPS dan sebagainya yang sudah diterbitkan), dan sumber referensi lainnya. Secara umum ada dua jenis tersier (referensi) yaitu sumber yang diterbitkan dalam bentuk teks (cetak) dan yang kedua diterbitkan dalam bentuk gambar atau video



BAB IV

GAMBARAN UMUM DINAS TENAGA KERJA

KOTA PEKANBARU

Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Disnaker kota Pekanbaru adalah dinas yang memiliki kewenangan dibidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja juga perlindungan tenaga kerja pada wilayah kota Pekanbaru.

Tugas utama Disnaker adalah sebagai instansi pemerintah dibidang tenaga kerja daerah wilayah kerjanya. Untuk fungsi dari Disnaker diantaranya merumuskan kebijakan ketenagakerjaan, pelaksana kebijakan tenaga kerja, administrasi ketenaga kerjaan, pengawasan tenaga kerja, pelaporan dan evaluasi bidang tenaga kerja. Terkait dengan tugas dan fungsinya, maka Disnaker daerah ini memiliki beberapa wewenang perizinan seperti Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh, Kartu Izin Ketenagakerjaan, Izin kerja, hingga Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Warga dapat mengurus izin Disnaker melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Disnaker ini.

4.2. Landasan Hukum

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru memmiliki landasan hukum yang cukup jelas dalam berupaya mengatasi masalah pengagguran di Kota Pekanbaru. Adapun landasan hukumnya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Handwritten text on the left margin: "Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang", "1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan mencantumkan sumber:", "a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.", "b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau."

© Mak Sipta milik UIN Suska Riau
Gate of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada poin (a) bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada poin (b) pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Pada Pasal 18 ayat 1 tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan swasta, atau pelatihan di tempat kerja.

Penyelenggaraan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam UU Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 7: Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

4.3. Visi dan Misi DISNAKER Kota Pekanbaru

Sebagaimana diamanahkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau



Halaman 10 dari 10

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama penulis dan sumbernya.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2005-2025 adalah: **"Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Batin, di Asia Tenggara Tahun 2025"**.

Selanjutnya, visi jangka panjang tersebut diuraikan ke-dalam Misi dan misi Disnaker kota Pekanbaru sebagai berikut:

4.3.1. Visi Disnaker Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru ialah sebagai berikut:

"Terwujudnya Tenaga Kerja Yang Produktif, Berdaya Saing Dan Mandiri Menuju Masyarakat Sejahtera."

Guna melanjutkan visi pembangunan Provinsi Riau diatas, maka disusunlah visi antara pembangunan jangka menengah lima tahun oleh kepala daerah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 yang merupakan pengejawantahan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau saat ini merupakan tahap Keempat RPJPD yang berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian. Visi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 :

"Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)".



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.2. Misi Disnaker Kota Pekanbaru

Adapun misi yang dijalankan untuk mencapai visi jangka menengah tersebut adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas pelayanan;
2. Meningkatkan pemerintahan yang cerdas melalui peningkatan aparatur dan tertib administrasi sesuai dengan pelayanan prima;
3. Mewujudkan tenaga kerja yang cerdas, berkualitas dan produktif sesuai kebutuhan dunia kerja;
4. Meningkatkan pembinaan kesempatan kerja dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan yang aktual;
5. Meningkatkan standar pengupahan dan syarat kerja sehingga tercipta hubungan industrial yang selaras, serasi dan seimbang.

4.4. Tugas Pokok dan Fungsi Disnaker Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan merencanakan program kegiatan pelatihan dan pemagangan;
2. Menyediakan data dan pelatihan dan pemagangan yang dapat diakses oleh masyarakat;

3. Penguatan sistem dan metode pelatihan dan pemagangan;
Mengkoordinasikan lembaga pelatihan dan pemagangan dalam bentuk jaringan kerjasama;



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

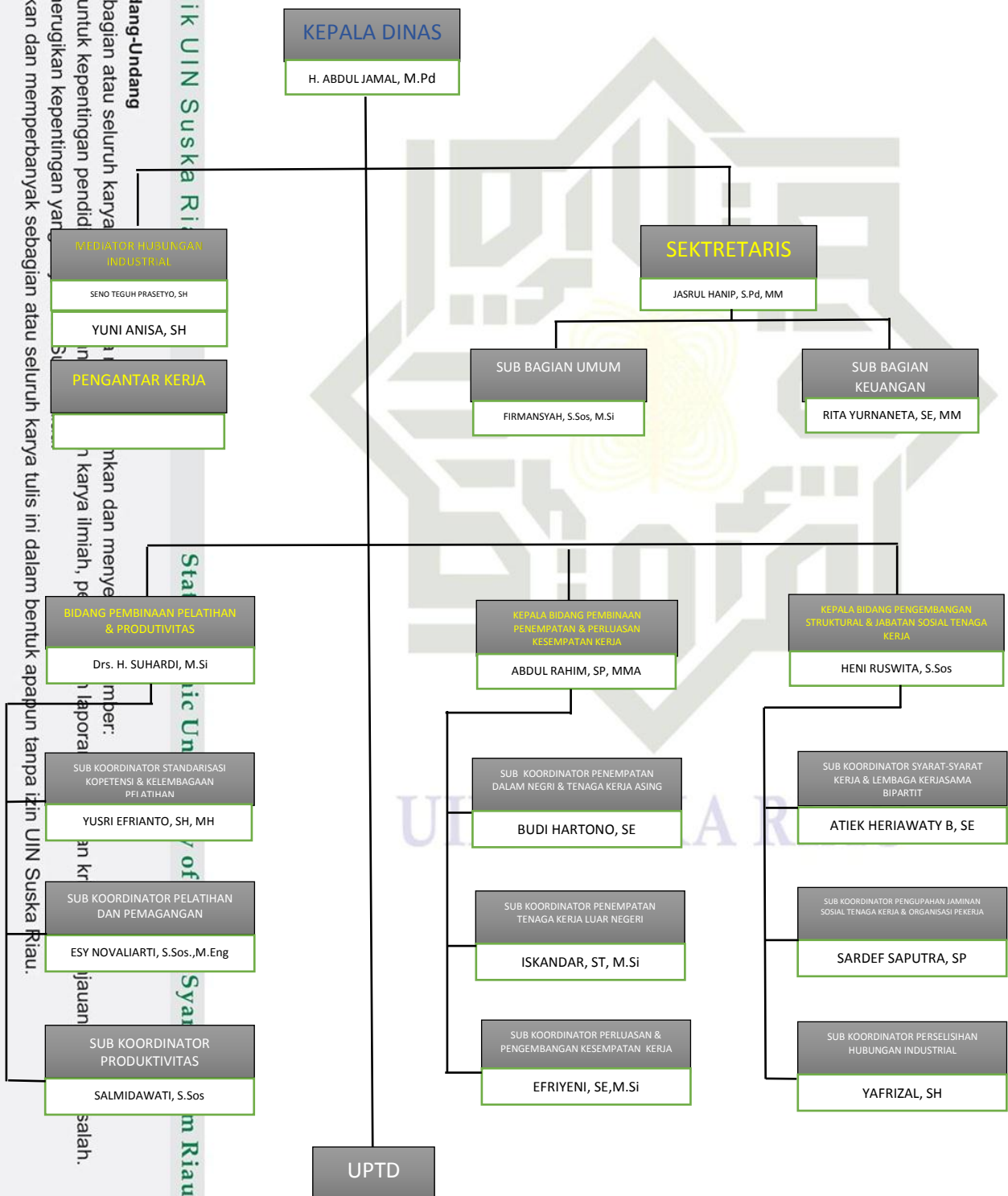


4.5. Struktur Birokrasi Disnaker Kota Pekanbaru

GAMBAR 4.1

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan maka penulis berkesimpulan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sangat berperan dalam menjembatani dan memwadhahi para pencari kerja dengan perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja, namun dikarenakan berbagai faktor eksternal seperti pandemi membuat lonjakan pengangguran besar-besaran membuat Disnaker kota Pekanbaru kualahan dalam mengendalikan angka pengangguran terdidik di Pekanbaru.

Namun disisi lain Disnaker justru tidak memiliki strategi kusus dalam mengatasi masalah pengangguran terdidik. Hal ini dikarenakan Disnaker beranggapan bahwa pengangguran dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan yang tidak sama saja, semuanya menjadi tanggung jawab Disnaker maka tidak ada perlakuan ataupun perhatian kusus terhadap golongan tertentu.

Untuk mengatasi masalah pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru berupaya menekan jumlah pengangguran dengan membuat dan melaksanakan program ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan sasaran para pencari kerja. Dalam program ketenagakerjaan ini, Dinas Tenaga Kerja melaksanakan kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan program ini. dua program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Basim Riau

- a. Pelatihan Kerja
 - b. Pemagangan
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

A. Penempatan Tenaga Kerja pada Sektor Formal

- a. Job Canvassing
- b. Pameran Bursa Kerja atau Job Expo
- c. Bursa Kerja Online

B. Penempatan Tenaga Kerja pada Sektor Informal

Pendayagunaan tenaga kerja pada sektor informal dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat :
 1. Pelatihan Terapan Teknologi Tepat Guna
 2. Home Industry
 3. Pemberdayaan Padat Karya : a) Infrastruktur, b) Produktif
- b. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan.

Seluruh program tersebut tentunya tidak berjalan dengan mulus dikarenakan berbagai hambatan mulai dari masalah pandemi, masalah sumberdaya, tingkat pengangguran yang belum sebanding dengan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.

Namun upaya Disnaker dalam menyebarluaskan informasi peluang kerja sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan Disnaker



- UIN SUSKA RIAU
- Handicraft Bilindang UIN Suska Riau
1. Dilarang menyalip atau seluruh karya tulis inapda nentumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta © mik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memanfaatkan dengan baik teknologi informasi saat ini sehingga iformasinya di akses dan tepat sasaran. Dengan adanya aplikasi website “Infokerja” pencari kerja dan perusahaan selaku pengguna tenaga kerja merasa dimudahkan karena mereka dapat langsung mendaftar (bagi pencari kerja) ataupun melapor pengguna tenaga kerja) dimanapun dan kapanpun sehingga menjadi lebih efisien.

Terpenuhinya seluruh posisi jabatan struktural dan memiliki pegawai 8 orang yang mana rata-rata pegawainya telah menempuh pendidikan S1 bahkan 2, maka dapat dikatakan bahwa Disnaker kota Pekanbaru memiliki sumberdaya manusia yang cukup baik, serta memiliki standar oprasional prosedur SOP) yang cukup jelas, tentunya ini akan berimplikasi pada pelayanan yang diberikan.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Dinas tenaga kerja hendaknya memiliki kebijakan maupun strategi khusus dalam menangani masalah pengagguran terdidik karena tantangan terbesar dimasa depan adalah terjadinya ledakan usia produktif di indonesia atau yang disebut dengan fenomena bonus demografi serta beriringan dengan kemajuan teknologi yang menuntut para pencari kerja harus memiliki skill dan keahlian khusus agan tidak tergantikan oleh otomatisasi atupun robotik.
2. Hendaknya Disnaker Kota Pekanbaru bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengidentifikasi lulusannya, tujuannya supaya pekerjaan

yang didapatkan sesuai dengan skill dan keahlian pencari kerja. agar program yang dijalankan tepat sasaran.

3. Disnaker hendaknya mempertegas peraturan dan juga sanksi terkait pelaporan informasi lowongan kerja oleh perusahaan kepada Disnaker, dikarenakan saat ini masih banyak perusahaan yang masih belum mengindahkan perintah peraturan yang sebelumnya.

4. Hendaknya Disnaker untuk lebih transparan lagi terkait data Ketenagakerjaan agar mudah di akses oleh siapapun yang membutuhkan. Salah-satunya data penyebaran populasi pengangguran terdidik di kota Pekanbaru, UU ataupun peraturan yang sedang dijlankan, alokasi anggaran dan lain sebagainya (selain data yang bersifat rahasia) dalam sebuah Website resmi Disnaker Kota Pekanbaru agar mudah diakses dan dipergunakan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



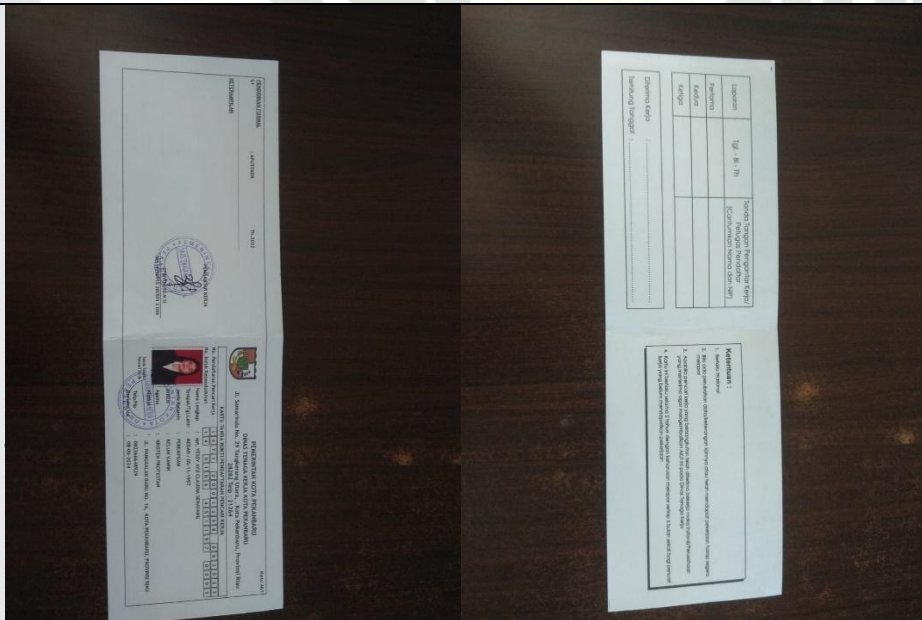
DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Satef Santri, Universitas Suarda Kasim Riau
- Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Effendy. Onong Uchjana. 2009. Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Na'awi. Hadari. 1993. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Pradjho, Danny Soesilo dan Setyorini 2005. Kinerja Alumni BK FISIP UKSW dan Faktor yang Melatarbelakangi. Satya Widya vol. 18 No.1 Juni 2005.
- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Luliartha, Edward. 2009. Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Angkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik (Trasformasi Pikiran George Edwards). Yogyakarta: YPAPI.
- Suparmoko, 1997. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. BPFE Yogyakarta.
- Boleh, A. (2017). Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 6(2), 83–92.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijaksanaan Publik. Bandung: CV. Alfabeta. Hal. 24-28.
- Payaman, J. Simanjuntak. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit FE UI.
- Paul L. Tobing. 2007 Konsep Knowledge Management, Konsep, Arsitektur dan Implementasi, Graha Ilmu.
- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi Winarno, 2012. Kebijakan Publik: Theory, Proses, Dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Moleong. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif, CV. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hartanti, W, & Mayarni, M. (2018). Pelaksanaan Program Pemagangan Dalam Negeri Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2016. Riau University.

LAMPIRAN



Kantor Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru



Kartu Pencari Kerja AK.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Kabid Pembinaan Penempatan & Perluasan
Kesempatan Kerja, Abdul Rahim, SP, MMA



Wawancara bersama Sub Koordinator Penempatan Dalam Negeri &
Tenaga Kerja Asing Budi Hartono, SE



Wawancara bersama Sub Bagian Umum. Firmansyah, S.Sos, M.Si



Wawancara bersama pencari kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/2165/2022 Pekanbaru, 17 Mei 2022 M
 Sifat : Biasa 15 Syawal 1443 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Virna Museliza, SE, M. Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :
 Nama : Zulkifli Alwi
 NIM : 11575104604
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : XIV (Empat Belas)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Upaya Mengurangi Masalah Pengangguran Terdidik di Wilayah Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



D. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 619790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2039/2022 Pekanbaru, 13 April 2022 M
 Sifat : Biasa 11 Ramadhan 1443 H
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Kepada
 Yth. Kantor Dinas
 Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
 di Tempat

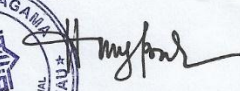

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Zulkifli Atwi
 NIM. : 11575104604
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : XIV (Empat Belas)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
 "Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Upaya Mengurangi Masalah
 Pengangguran Terdidik di Kota Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya
 Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
 tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


 Dr. H. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/47543
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2039/2022 Tanggal 13 April 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

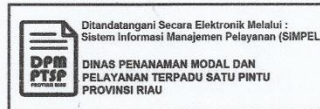
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ZULKIFLI ALWI |
| 2. NIM / KTP | : 11575104604 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM UPAYA MENGURANGI MASALAH PENGANGGURAN TERDIDIK DI WILAYAH KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Mei 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1110/2022



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/47543 tanggal 17 April 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : ZULKIFLI ALWI
2. NIM : 11575104604
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. MESJID AL-FALAH KEL. KOTOBARU SEBERIDA KEC. KERITANG-INDRAGIRI HILIR
7. Judul Penelitian : ANALISIS PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM UPAYA MENGURANGI MASALAH PENGANGGURAN TERDIDIK DI WILAYAH KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 Mei 2022

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Sekretaris



Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

BIOGRAFI PENULIS



Zulkifli Alwi, lahir pada tanggal 07 Juni 1996 di desa Kotabaru Kec. Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Anak ke-7 dari 7 bersaudara dari pasangan Ayahanda Jasuli (alm) dan Ibunda Sanatang (almh). Penulis memulai pendidikan pada tingkat dasar di SD Negeri 002 Kotabaru Seberida, lanjut pada tingkat menengah di SMP Negeri 1 Keritang, Penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Keritang dan lulus pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil program studi Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Semasa perkuliahan Penulis aktif dalam organisasi internal yakni Badan Legelatif Mahasiswa (BLM) FEKONSOS maupun eksternal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI). Bersamaan dengan itu penulis juga sambil bekerja untuk menambah pengalaman dan menghasilkan *income* serta mengikuti berbagai kursus untuk meningkatkan skill dan keahlian.

Pembelajaran yang paling berkesan serta bermanfaat bagi penulis semasa di perkuliahan adalah bagaimana Penulis berkembang dan merasa lebih baik dari sebelumnya, mengasah kemampuan berpikir kritis, menganalisis dan memecahkan masalah serta membuka perspektif baru dalam mengambil keputusan, dan tak kalah penting adalah membangun jiwa kepemimpinan.

Jelajar sarjana ini tentu tidak menjadi akhir dari proses pembelajaran Penulis karena Penulis masih merasa belum cukup dan puas dalam menimba ilmu.